

Dinasti Umayyah (661 - 750 M) : Peninggalan Sejarah dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Islam

Lina Wati^{1*}, Rika Wulandari², Septia Shylviana³, Rapida Idami⁴, Sirojul Fuadi⁵

^{1,2,3,4} STKIP AL Maksum Langkat, Stabat, Indonesia

Email: lina20wati20@gmail.com^{1*}, rikawulandary41@gmail.com², silvianaseptia@gmail.com³, rapidaidami@gmail.com⁴

Korespondensi penulis : lina20wati20@gmail.com

Abstract: *The Umayyad Dynasty (661–750 AD) was the first Islamic dynasty to implement a hereditary monarchy and played a significant role in the massive expansion of Islamic rule. After the end of the Caliphate, power passed to Muawiyah ibn Abu Sufyan, who founded the dynasty and moved the center of government to Damascus. This study aims to examine the political, social, economic, and religious dynamics during the Umayyad Dynasty through qualitative methods and a literature review approach. The results of the study indicate that the success of the Umayyad expansion to Spain in the west and India in the east was driven by solid military strength, intelligent diplomatic strategies, and an established government administration system. In the economic aspect, the Umayyad Dynasty developed a taxation and currency system that supported the country's financial stability. Infrastructure such as roads, postal services, and communication systems were also improved to support connectivity between regions. In the social and cultural fields, interactions between various ethnicities and religions encouraged the development of science, art, literature, and architecture, including the emergence of a distinctive Islamic architectural style. However, the unequal social system between Arabs and non-Arabs (mawali), as well as discrimination within the government, fueled public dissatisfaction. Furthermore, sectarian conflict between Sunnis and Shiites exacerbated the domestic political situation. Inequities in the distribution of power, nepotism, and authoritarianism were the main causes of the weakening of support for the Umayyad government. Ultimately, this dynasty collapsed after being overthrown by the Abbasid Dynasty in 750 CE. This study emphasizes that the success of a government is greatly influenced by just leadership, an inclusive government system, and the ability to respond adaptively to socio-political challenges.*

Keywords: *caliphate, Islamic history, literature review, qualitative approach, Umayyad Dynasty*

Abstrak: Dinasti Umayyah (661–750 M) merupakan dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan monarki turun-temurun dan berperan penting dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam secara masif. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan beralih ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan dinasti ini dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah melalui metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi Umayyah hingga ke Spanyol di barat dan India di timur didorong oleh kekuatan militer yang solid, strategi diplomasi yang cerdas, dan sistem administrasi pemerintahan yang mapan. Dalam aspek ekonomi, Dinasti Umayyah mengembangkan sistem perpajakan dan mata uang yang mendukung stabilitas keuangan negara. Infrastruktur seperti jalan, pos, dan sistem komunikasi juga ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah kekuasaan. Di bidang sosial dan budaya, interaksi antara berbagai etnis dan agama mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan arsitektur, termasuk munculnya gaya arsitektur Islam yang khas. Meski demikian, sistem sosial yang timpang antara kaum Arab dan non-Arab (mawali), serta diskriminasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Selain itu, konflik sektarian antara Sunni dan Syiah turut memperburuk kondisi politik dalam negeri. Ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, praktik nepotisme, dan otoritarianisme menjadi penyebab utama melemahnya dukungan terhadap pemerintahan Umayyah. Akhirnya, dinasti ini runtuh setelah digulingkan oleh Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang adil, sistem pemerintahan yang inklusif, serta kemampuan untuk merespons tantangan sosial-politik secara adaptif.

Kata kunci: Dinasti Umayyah, sejarah Islam, pendekatan kualitatif, kajian sastra, kekhalifahan

1. PENDAHULUAN

Dinasti Umayyah merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam yang menandai transformasi besar dalam sistem pemerintahan Islam dari bentuk khilafah yang bersifat kolektif dan dipilih menjadi sistem monarki turun-temurun atau dinasti. Peralihan ini dimulai ketika Muawiyah bin Abi Sufyan naik takhta sebagai khalifah pada tahun 661 M, menyusul wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Muawiyah menjadi pendiri resmi Dinasti Umayyah, yang kemudian menjadikan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan dan menjadikan struktur pemerintahan lebih terorganisasi dengan corak administratif yang menyerupai pemerintahan Bizantium. Masa kekuasaan dinasti ini berlangsung hingga tahun 750 M dan mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Spanyol di Barat hingga India di Timur, menjadikan Islam sebagai kekuatan politik dan budaya global pada masa itu (Zaman, 2021).

Di bawah pemerintahan Dinasti Umayyah, ekspansi wilayah Islam terjadi secara masif dan terencana. Beberapa pencapaian besar dalam bidang militer dan administrasi berhasil mengkonsolidasikan wilayah-wilayah baru ke dalam kekuasaan Islam. Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik dikenal sebagai tokoh penting yang memperluas pengaruh Islam ke Afrika Utara, Semenanjung Iberia (Spanyol), dan kawasan Asia Tengah. Tidak hanya reformasi itu, Dinasti Umayyah juga memperkenalkan bahasa dan keuangan dengan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi serta pencetakan mata uang Islam yang pertama. Langkah-langkah ini menandai upaya standarisasi pemerintahan dan identitas Islam yang lebih kuat di seluruh wilayah kekuasaan (Ali & Bukhari, 2020).

Namun, di balik keberhasilan militer dan administratif tersebut, Dinasti Umayyah tidak lepas dari kontroversi, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan dan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok non-Arab (mawali). Kebijakan tersebut menciptakan ketegangan sosial yang signifikan, terutama di kalangan Muslim non-Arab yang merasa termarginalkan secara politik maupun ekonomi. Ketimpangan ini berkontribusi pada munculnya gerakan-gerakan oposisi, terutama dari kelompok Syiah dan Abbasiyah, yang menentang dominasi Arab dan sistem pewarisan kekuasaan dinasti. Kritik utama diarahkan pada cara Muawiyah mengangkat anak Yazid sebagai penerus, yang dianggap berbeda dengan prinsip-prinsip dasar khilafah yang berbasis syura (musyawarah) dalam Islam (Rahman, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur terhadap sumber-sumber sejarah modern yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dinamika kekuasaan Dinasti Umayyah, termasuk faktor keberhasilan dan

tantangan internal yang dihadapi, serta pengaruh jangka panjang terhadap sejarah politik Islam. Dengan menganalisis sumber-sumber terbaru, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kepemimpinan dan tata kelola kekuasaan dalam masyarakat Islam awal. Kajian ini penting sebagai bahan refleksi untuk memahami bagaimana perbedaan etnis, dinasti politik, dan legitimasi kekuasaan menjadi bagian dari tantangan dalam membangun sistem pemerintahan Islam yang adil dan inklusif (Nadvi, 2023).

Dengan demikian, Dinasti Umayyah bukan hanya dikenang karena pencapaiannya yang luar biasa dalam perluasan wilayah Islam, tetapi juga sebagai periode yang menyimpan banyak pelajaran penting mengenai hubungan kekuasaan, keadilan sosial, dan identitas umat. Kajian sastra terhadap dinasti ini membuka ruang bagi analisis kritis terhadap dinamika pemerintahan Islam awal, sekaligus memberikan kontribusi dalam memahami tantangan kontemporer yang dihadapi dunia Islam saat ini, khususnya dalam mengelola kekejaman dan keadilan dalam struktur kekuasaan (Fakih, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (library Research). Pendekatan ini dianggap paling relevan dalam mengkaji sejarah Dinasti Umayyah karena fokus pada penelusuran dan penafsiran data sejarah dari berbagai sumber tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku sejarah Islam klasik dan modern, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen relevan lainnya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sastra-sastra ini dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dalam menjelaskan berbagai aspek kekuasaan Dinasti Umayyah, seperti aspek politik, militer, ekonomi, sosial, dan keagamaan (Ali & Bukhari, 2020; Rahman, 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi interpretatif terhadap dokumen-dokumen sejarah yang membahas Dinasti Umayyah secara komprehensif. Studi interpretatif ini bertujuan memahami dinamika kekuasaan dan perkembangan peradaban pada masa Dinasti Umayyah dengan mengungkap makna di balik peristiwa-peristiwa sejarah, bukan sekadar merekonstruksi fakta. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang relevan, seperti struktur politik dan sistem pemerintahan, strategi militer dan ekspansi wilayah, perkembangan ekonomi dan keuangan, dinamika sosial dalam masyarakat multietnis, serta kebijakan keagamaan dan hubungan dengan kelompok non-Arab (Zaman, 2021; Nadvi, 2023).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu menyajikan kronologi sejarah, tetapi juga menawarkan interpretasi kritis terhadap berbagai kebijakan Dinasti Umayyah dan dampaknya terhadap umat Islam saat itu. Selain itu, analisis tematik memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengkaji lebih dalam mengenai kontribusi maupun kelemahan Dinasti Umayyah dalam membentuk fondasi politik Islam awal (Fakih, 2021).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Dinasti Umayyah

Latar belakang berdirinya Dinasti Umayyah tidak dapat terlepas dari dinamika politik yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 M. Pembunuhan terhadap Utsman memicu terjadinya konflik internal yang dikenal sebagai Fitnah Pertama, yakni perang saudara di antara kaum Muslimin yang mempertentangkan kepemimpinan umat Islam. Situasi semakin memanas ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat, namun tidak semua wilayah menyatakan kesetiaan kepadanya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat dekat Utsman. Muawiyah menuntut balas atas kematian Utsman dan menolak baiat kepada Ali, yang berakhir pada konflik bersenjata antara keduanya, salah satunya dalam Perang Shiffin (657 M) (Rahman, 2022).

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam rangka mendamaikan umat Islam, Hasan melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah pada tahun 661 M. Dalam perjanjian tersebut, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa kekuasaan tidak akan diwariskan secara turun-temurun dan setelah wafatnya Muawiyah, kepemimpinan akan dikembalikan kepada umat Islam melalui musyawarah (syura). Namun, setelah Muawiyah memegang tampuk kekuasaan, ia justru mendeklarasikan putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerusnya. Keputusan ini menandai lahirnya sistem kekhalifahan turun-temurun (monarki herediter) yang sebelumnya tidak dikenal dalam khilafah Rasyidah (Zaman, 2021).

Dengan demikian, berdirinya Dinasti Umayyah secara resmi dimulai pada tahun 661 M di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Pemerintahannya menciptakan tatanan politik baru yang lebih berbelit-belit, otoriter, dan berbasis pada loyalitas keluarga Quraisy, khususnya Bani Umayyah. Dinasti ini mempertahankan kekuasaan hingga tahun 750 M, dan selama itu menghadirkan banyak perubahan dalam sistem pemerintahan Islam, meskipun sering kali disertai dengan kontroversi terkait legitimasi kekuasaan dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (Nadvi, 2023; Fakih, 2021).

Ekspansi Wilayah dan Stabilitas Politik

Ekspansi wilayah merupakan salah satu pencapaian terbesar Dinasti Umayyah yang menjadikannya sebagai kekuatan politik global pada abad ke-7 dan ke-8 M. Di bawah pemerintahan khalifah-khalifah kuat seperti Al-Walid bin Abdul Malik dan sebelumnya Abdul Malik bin Marwan, wilayah kekuasaan Islam membentang dari semenanjung Iberia (Spanyol) di barat, melintasi Afrika Utara, Syam, Jazirah Arab, Persia, hingga mencapai wilayah India bagian barat di timur. Capaian ini menjadikan Dinasti Umayyah sebagai kekhalifahan Islam dengan wilayah terluas dalam sejarah sebelum masa Kekhalifahan Abbasiyah (Ali & Bukhari, 2020).

Dalam upaya mempertahankan stabilitas politik di wilayah yang begitu luas dan beragam etnis, Dinasti Umayyah mengandalkan struktur administrasi yang relatif murah. Al-Walid bin Abdul Malik, misalnya, dikenal melakukan berbagai reformasi dalam sistem administrasi pemerintahan dan infrastruktur pembangunan, seperti pembangunan jalan raya, pos, masjid-masjid besar, dan sistem pelayanan publik. Tidak kalah pentingnya, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai salah satu khalifah paling adil dalam sejarah Umayyah, menerapkan kebijakan-kebijakan reformis yang berpihak pada keadilan sosial, termasuk penghapusan pajak tambahan bagi Muslim non-Arab dan memperbaiki distribusi kekayaan negara (Zaman, 2021; Fakih, 2021).

Meskipun demikian, kekuatan militer tetap menjadi alat utama untuk menegakkan otoritas dinasti dan menumpas pemberontakan. Dinasti Umayyah juga sangat bergantung pada loyalitas klan, terutama Bani Umayyah dan para pendukung suku Quraisy. Struktur kekuasaan dibangun di atas jaringan patronase suku dan hubungan kesetiaan keluarga, yang menyebabkan terkadang eksklusif terhadap kelompok lain, seperti mawali (Muslim non-Arab), yang dianggap kelas dua dalam tatanan sosial-politik Umayyah. Penggunaan kekuatan militer yang represif serta politik identitas berbasis klan inilah yang dalam jangka panjang memicu perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa termarginalkan (Nadvi, 2023; Rahman, 2022).

Sistem Administrasi dan Ekonomi

Dalam membangun kekuasaan yang luas dan terstruktur, Dinasti Umayyah memusatkan sistem pemerintahannya di kota Damaskus, ibu kota yang dipilih karena letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat-pusat pemerintahan sebelumnya, seperti Bizantium. Pemerintahan Umayyah mengadopsi banyak unsur birokrasi dari model pemerintahan Romawi Timur dan Persia, namun memberikan sentuhan Islam dalam penerapannya. Salah

satu langkah penting yang dilakukan adalah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara, menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti Yunani di wilayah Syam dan Persia di wilayah timur kekhalifahan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat identitas politik Islam, tetapi juga mendorong penyatuan budaya dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan yang multietnis (Zaman, 2021).

Dalam aspek ekonomi, Dinasti Umayyah menerapkan sistem perpajakan yang bersumber dari tiga jenis utama: jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim; zakat, yang diwajibkan bagi umat Islam; dan kharaj, yaitu pajak atas tanah pertanian. Ketiga jenis pungutan ini menjadi sumber utama pemasukan negara dan menopang stabilitas fiskal yang cukup kuat selama pemerintahan Umayyah. Namun dalam praktiknya, sistem ini juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama antara kaum Arab dan kelompok Muslim non-Arab (mawali). Meskipun para mawali telah menganut agama Islam, mereka tetap dikenakan jizyah dalam beberapa kasus, dan tidak mendapatkan hak serta posisi yang setara dalam pemerintahan, yang menunjukkan adanya diskriminasi struktural dalam sistem administrasi dan ekonomi yang dibangun (Ali & Bukhari, 2020; Nadvi, 2023).

Ketimpangan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-Arab, tetapi juga meningkatkan legitimasi politik Umayyah di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Persia dan Irak yang sebagian besar penduduknya merupakan mawali. Situasi ini menjadi salah satu pemicu utama bagi munculnya gerakan perlawanan, termasuk dari kelompok Abbasiyah, yang pada akhirnya menengangkan Dinasti Umayyah. Meskipun demikian, harus diakui bahwa keberhasilan administrasi fiskal Umayyah turut menciptakan sistem keuangan negara yang lebih tertata dibandingkan periode sebelumnya, dan menjadi dasar bagi pemerintahan Islam selanjutnya (Fakih, 2021; Rahman, 2022).

Isu Sosial dan Sektarian

Isu sosial dan sektarian menjadi salah satu titik rawan yang terus membayangi kekuasaan Dinasti Umayyah sepanjang pemerintahannya. Salah satu akar ketegangan terbesar muncul dari kebijakan diskriminatif terhadap kaum mawali, yaitu Muslim non-Arab yang telah menganut Islam, terutama dari kalangan Persia, Kurdi, Berber, dan lainnya. Meskipun secara teologis mereka telah masuk Islam dan seharusnya mendapatkan hak yang sama, dalam praktiknya mereka tetap berada diposisikan sebagai kelas kedua dalam sistem sosial dan politik kekhalifahan Umayyah. Mereka sering kali tetap dikenai pajak jizyah seperti halnya non-Muslim, dan mengalami kesulitan untuk menempati posisi penting dalam birokrasi pemerintahan (Nadvi, 2023; Fakih, 2021). Ketimpangan ini menimbulkan kekecewaan dan

ketidakpuasan yang meluas, terutama di wilayah timur seperti Khurasan dan Irak, yang kelak menjadi basis perlawanan terhadap Umayyah.

Selain masalah etnis, konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah juga menjadi persoalan besar yang belum terselesaikan selama pemerintahan Umayyah. Kelompok Syiah yang merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, merasa bahwa kekuasaan telah diselewengkan dari hak keluarga Nabi Muhammad. Penolakan terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, yang dianggap tidak sah, memuncak dalam tragedi Karbala pada tahun 680 M yang menurunkan Husain bin Ali. Peristiwa tersebut tidak hanya memperdalam luka sejarah, tetapi juga memperkokoh identitas politik Syiah sebagai kelompok oposisi terhadap Umayyah (Rahman, 2022). Pemerintahan Umayyah merespons dengan tindakan represif terhadap kelompok ini, yang justru memperkuat sentimen anti-pemerintah di banyak wilayah.

Di sisi lain, kelompok Khawarij juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas internal Dinasti Umayyah. Berbeda dengan Syiah, Khawarij adalah kelompok yang menolak seluruh bentuk kekuasaan yang mereka anggap menyimpang dari nilai-nilai Islam yang murni, termasuk kekhalifahan Ali maupun Muawiyah. Mereka terkenal radikal dan melakukan berbagai pemberontakan terhadap pemerintahan Umayyah, terutama di wilayah pinggiran seperti Oman dan Irak selatan. Meskipun berhasil ditekan secara militer, pemberontakan-pemberontakan ini menyita banyak sumber daya dan menunjukkan bahwa pemerintahan Umayyah tidak pernah benar-benar solid dalam mengatasi konflik horizontal di tubuh umat Islam (Zaman, 2021; Ali & Bukhari, 2020).

Dengan demikian, ketimpangan sosial dan ketegangan sektarian bukan hanya menjadi tantangan administratif, tetapi juga menggerogoti legitimasi moral dan keagamaan Dinasti Umayyah. Kebijakan yang eksklusif terhadap non-Arab dan pendekatan militeristik terhadap kelompok oposisi mempercepat munculnya gerakan transmisi dari bawah yang pada akhirnya memerintah kekuasaan Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya Dinasti Abbasiyah (Fakih, 2021).

Kemunduran dan Kejatuhan Dinasti

Masa misalnya Dinasti Umayyah ditandai dengan melemahnya legitimasi politik, meningkatnya ketidakpuasan sosial, serta munculnya praktik korupsi dan nepotisme di dalam tubuh pemerintahan. Semakin kuatnya kecenderungan kekuasaan yang bersifat dinastik dan eksklusif menyebabkan ketegangan antara penguasa Arab dengan kelompok non-Arab (mawali), yang tetap mengalami diskriminasi meskipun telah menganut Islam. Ketimpangan sosial ini memperkuat gerakan oposisi, khususnya di wilayah timur kekhalifahan seperti

Khurasan dan Irak, yang menjadi dasar dukungan bagi kelompok Abbasiyah (Nadvi, 2023; Rahman, 2022). Dinasti Umayyah juga menghadapi kelemahan struktural akibat pengelolaan kekuasaan yang cenderung sentralistik dan tidak adaptif terhadap aspirasi rakyatnya.

Salah satu faktor penting yang mempercepat kehancuran kekuasaan Umayyah adalah gerakan revolusi Abbasiyah, yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini mendapat dukungan besar dari kalangan Syiah, mawali, serta kelompok Sunni yang kecewa dengan praktik kekuasaan Umayyah. Puncak dari revolusi ini terjadi pada tahun 750 M melalui Pertempuran Zab, di tepi Sungai Zab Besar di Irak utara. Dalam pertempuran ini, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan Khalifah Marwan II, khalifah terakhir dari Dinasti Umayyah. Marwan II dihilangkan dalam pelariannya ke Mesir, yang sekaligus menandai runtuhnya kekuasaan Umayyah di wilayah Timur Islam (Zaman, 2021; Fakih, 2021).

Meskipun pemerintahan Umayyah runtuh secara resmi, keturunan Bani Umayyah masih berhasil melanjutkan kekuasaan mereka di Andalusia (Spanyol) pada tahun 756 M di bawah kepemimpinan Abdurrahman ad-Dakhil. Di wilayah barat ini, Dinasti Umayyah mendirikan kekhalifahan baru yang dikenal sebagai Kekhalifahan Umayyah di Córdoba, yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam yang penting di dunia Barat selama berabad-abad (Ali & Bukhari, 2020). Dengan demikian, meskipun kekuasaan politik Umayyah berakhir di Timur, warisan intelektual dan administratifnya tetap hidup dan mempengaruhi melalui cabang kekuasaan mereka di Andalusia.

4. KESIMPULAN

Dinasti Umayyah memberikan warisan penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam hal ekspansi wilayah dan konsolidasi pemerintahan. Namun, praktik kekuasaan yang eksklusif dan ketimpangan sosial menjadi titik lemah yang menyebabkan kehancuran dinasti ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan Islam tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada keadilan sosial dan inklusivitas umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, L. (2020). *Bani Umayyah: Kebangkitan dan Kejatuhan Dinasti Islam Pertama*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Hadith.
- Al-Azmeh, A. (2021). *Kemunculan Islam di Akhir Zaman Kuno: Allah dan Umat-Nya*. Cambridge University Press.
- Ali, A., & Bukhari, S. (2020). *Dinamika Sejarah Kekhalifahan Bani Umayyah*. *Jurnal Kajian Sejarah Islam*, 5(2), 112–125.

- Asad, M. (2020). Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan dalam Islam. Islamic Book Trust.
- Fakih, M. (2021). Kritik Historis terhadap Kebijakan Dinasti Umayyah. Jakarta: Lentera Ilmu Pers.
- Hassan, R. (2023). Kekuasaan, Politik, dan Agama di Awal Islam: Warisan Umayyah. *Jurnal Peradaban Islam*, 12(1), 88–101.
- Hitti, PK (2020). Sejarah Bangsa Arab. London: Palgrave Macmillan.
- Khan, MY (2022). Reformasi Administrasi pada Masa Umayyah. *Jurnal Internasional Studi Timur Tengah*, 54(3), 275–289.
- Lapidus, IM (2019). Sejarah Masyarakat Islam. Cambridge University Press.
- Mernissi, F. (2021). Jilbab dan Elit Laki-laki: Sebuah Interpretasi Feminis tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Buku-Buku Dasar*.
- Nadvi, H. (2023). *Kekuasaan dan Etnis di Awal Negara Islam*. *Tinjauan Tata Kelola Islam*, 8(1), 45–60.
- Rahman, MA (2022). Politik Syura dan Dinasti pada Awal Islam. *Jurnal Politik Islam*, 9(3), 77–89.
- Said, A. & Nour, I. (2021). Peran Mawali dalam Transformasi Politik Umayyah. *Jurnal Tata Kelola Islam*, 7(2), 110–128.
- Yusuf, T. (2020). Hirarki Sosial dan Sektarianisme di Kekhalifahan Umayyah. *Jurnal Islamiyat*, 5(1), 59–74.
- Zahra, N. (2019). Negara Islam di Era Umayyah: Tantangan dan Kontribusi. *Studi Islam Kontemporer*, 6(4), 205–220.
- Zaman, MQ (2022). Pemikiran Politik Islam: Sebuah Pengantar Historis. Princeton University Press.